

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana distribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 sebesar 24,17 %. Penyumbang PDRB terbesar yaitu pada sektor perkebunan sebesar 15,42% dari total PDRB dan distribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2018 sebesar 28,89% dan yang menyumbang PDRB terbesar yaitu dari sektor perkebunan sebesar 19,68% dari total PDRB (BPS Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat, 2018). Adapun beberapa sektor dalam pertanian yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto baik atas harga dasar maupun harga konstan (PDRB), yaitu:

Table 1.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ketapang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

	Lapangan Usaha	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017* (%)	2018** (%)
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,98	26,99	25,15	24,22	24,17
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	24,57	22,75	21,17	20,56	20,72
	a. Tanaman Pangan	1,74	1,81	1,84	1,84	1,91
	b. Tanaman Hortikultura	0,94	1,01	0,89	0,90	0,88
	c. Tanaman Perkebunan	18,92	17,09	15,76	15,32	15,43
	d. Peternakan	2,63	2,50	2,36	2,20	2,19
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,34	0,34	0,32	0,31	0,31
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,75	2,52	2,36	2,14	1,98
3	Perikanan	1,66	1,71	1,63	1,52	1,47

Sumber: BPS Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Table 2.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ketapang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

	Lapangan Usaha	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017* (%)	2018** (%)
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,80	30,68	29,01	28,59	28,89
¹	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa	27,17	26,36	24,89	24,72	25,23
	Pertanian					
	a. Tanaman Pangan	1,61	1,59	1,67	1,73	1,81
	b. Tanaman Hortikultura	0,95	0,98	0,87	0,88	0,86
	c. Tanaman Perkebunan	21,43	20,69	19,41	19,23	19,68
	d. Peternakan	2,84	2,75	2,62	2,56	2,57
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
²	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,85	2,59	2,45	2,27	2,12
³	Perikanan	1,78	1,74	1,66	1,60	1,54

Sumber: BPS Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Tanaman perkebunan Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang terdiri atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Total luas perkebunan rakyat yaitu 564.338 ha dengan produksi mencapai 973.442 Ton di tahun 2018 dan luas perkebunan besar 1.193.581 ha dengan produksi mencapai 2.498.760 Ton di tahun 2018 (BPS, 2018). Sedangkan Indonesia sendiri telah menetapkan target untuk meningkatkan produksi kelapa sawit dari 25 juta ton pada tahun 2012 menjadi 40 juta ton pada tahun 2020. Dalam hal ini mencapai target nasional kelapa sawit di Indonesia dengan mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit (GP, 2013). Sementara menurut Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dipublikasikan BPS (2016), sampai dengan akhir tahun 2015 diseluruh Indonesia beroperasi 1599 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meliputi 156 perusahaan besar negara (PBN) tersebar 19 provinsi dan 1443 perusahaan besar swasta (PBS) tersebar 24 provinsi. Dan di Kalimantan Barat sendiri tersebar 175 perusahaan kelapa

sawit yang tersebar di 14 Kabupaten kota, diantaranya 170 Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan 5 Perusahaan Besar Negara (PBN).

Table 3.1. Produksi dan luas perkebunan kelapa sawit rakyat dan perkebunan kelapa sawit besar.

Kab/Kota	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat(ton)	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (ha)	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Besar(ton)	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Besar(ha)
	2018	2018	2018	2018
Kalimantan Barat	973.442	564.338	2.498.760	1.193.581
Sambas	50.394	23.573	130.447	64.440
Bengkayang	152.997	98.417	151.142	63.030
Landak	23.399	35.587	190.536	88.682
Mempawah	7.079	4.267	9.388	12.595
Sanggau	224.898	149.597	188.633	141.176
Ketapang	228.410	103.640	1.070.130	387.099
Sintang	89.676	47.543	191.095	131.449
Kapuas Hulu	25.036	11.821	124.630	76.364
Sekadau	91.149	37.072	148.104	65.601
Melawi	26.927	10.095	89/454	40.760
Kayong Utara	17.338	8.206	86.630	35.115
Kubu Raya	29.316	27.756	118.571	87.270
Pontianak	-	-	-	-
Singkawang	6.823	6.764	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Dari tabel 3.1 ketapang merupakan daerah yang memiliki luas perkebunan dan produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang tinggi dibanding daerah lainnya di Kalimantan Barat.yaitu luas perkebunan rakyat sebebsar 103640 ha dengan produksi mencapai 228410 ton/bulan dan perkebunan besar 387099 ha dengan produksi 1070130 ton/bulan.

Perkebunan rakyat diperkenalkan melalui kebijakan plasma di Indonesia denagan nama PIR (Perusahaan Inti Rakyat) khusus sejak tahun 1977, berasal dari istilah *Nucleous Estate Small Holders (NES)*, yang diujicobakan pertama kali di daerah Alue

Ai Mirah (Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewa Aceh) dan Tabalong (Provinsi Sumatera Selatan). Dalam perkembangannya tahun 1986 menjadi Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), dan terus berlanjut sampai dengan Perkebunan Inti Rakyat-Koperasi Kredit Primer Untuk Anggota (PIR-KKPA) pada tahun 1995. Semua pola PIR tersebut merupakan proyek yang didanai dari pinjaman Bank Dunia, yang mencontoh dari program kemitraan yang diterapkan Amerika Selatan. pada dasarnya, pembangunan perkebunan ditempuh melalui empat pola pengembangan diantaranya, Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Pola Swadaya (PS) dan Pola perkebunan Besar (PB).

Pengertian dan pemahaman mengenai kemitraan antara lain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yaitu kerjasama usaha antara usaha kecil menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam terapaninya Ada tiga model kemitraan yang berkembang, yaitu (1) model kemitraan inti plasma yang dikelola oleh koperasi; (2) model kemitraan inti-plasma yang dikelola oleh perusahaan inti; dan (3) model kemitraan intiplasma yang dikelola oleh petani secara individu. Yang secara garis besar pola kemitraan perkebunan di Indonesia tersebut dikenal dengan (1) kemitraan pola PIR; (2) kemitraan pola KKPA; (3) kemitraan pola PRP (Sunarko, 2009).

Perkebunan kelapa sawit sebagai komoditi primadona, di dalam-nya terdapat beberapa bentuk kerjasama antara masyarakat dengan Perusahaan swasta maupun Perusahaan Besar Negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, pembangunan kelapa sawit pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya) didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98, pola ini bertujuan untuk meningkatkan produksi non migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan perkebunan, meningkatkan serta memberdayakan KUD di wilayah plasma.

Kerjasama petani dengan perusahaan dalam pengelolaan perkebunan yang menggunakan berbagai pola kemitraan tidak lepas dari berbagai kendala dalam penerapannya. Pendapatan dan pembiayaan menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan kemitraan perkebunan kelapa sawit rakyat. Para petani dalam sistem kemitraan pola KKPA dan pola PIR-Trans memiliki perbedaan harapan penerimaan petani dengan yang diberikan oleh perusahaan inti terhadap petani plasma perbulan. Sedangkan tujuan pembentukan perkebunan dan system kemitraannya yaitu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan skala usaha petani baik maupun perusahaan. Hal tersebut terjadi karena harga kelapa sawit yang tidak stabil diikuti harga bahan produksi kelapa sawit yang setiap tahun semakin naik.

Secara garis besar ada dua bentuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di kecamatan Singkup, yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri/swadaya dengan nama yang biasa disebut Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola melalui model kemitraan dengan pola pengembangan lewat Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Pola PIR merupakan bagian dari masa lalu, namun dengan mempelajari konsepsi pola ini secara menyeluruh akan memberikan referensi bagaimana baiknya pembangunan perkebunan diselenggarakan.

PIR adalah pembangunan satu kesatuan unit ekonomi meliputi komponen-komponen, kebun inti, unit pengolahan, kebun plasma, jalan kebun, fasilitas permukiman, penempatan petani plasma serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di kecamatan Singkup pola PIR yang diterapkan yaitu pola pengembangan PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR-TRANS), polanya tetap seperti pengembangan seri pola PIR namun yang bertindak selaku perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan swasta. Pendapatan petani plasma pola PIR-TRANS. Dalam rantai pemasaran Tandan Buah Segar (TBS), pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan konsumen akhir, sehingga harga beli PKS menentukan harga pada pelaku pasar lainnya. Petani plasma sudah memiliki ikatan penjualan hasil dengan perusahaan yang ditengahi koperasi, sehingga harga yang diterima petani plasma relatif lebih pasti.

Biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh petani dan harga ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan melibatkan pemerintah daerah (Dinas Perkebunan) sehingga petani akan menerima pendapatan yang pasti sesuai banyaknya Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan kebun plasmanya yang dikelolanya (Badrun,2010).

Pola kemitraan KKPA berkerja sama dengan masyarakat Kecamatan Singkup sejak tahun 1999 hingga sekarang. Pola kemitraan tersesbut menggunakan perusahaan inti bermitra dengan petani yang di wadahi oleh koperasi dalam meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya melalui kredit jangka pajang dari bank. Dalam hal ini, para petani belum merasakan dampak yang signifikan dengan diterapkanya pola kemitraan KKPA. Pendapatan yang diperoleh petani relatif rendah dari awal pembentukan hingga saat ini, para petani tidak memahami mekanisme penerimaan yang mereka peroleh. Dengan hasil TBS yang dihasilkan kebun relatif tinggi namun pendapatan yang terima petani tidak sebanding dengan hasil TBS yang diperoleh. Belum ada upaya yang signifikan yang dilakukan para petani anggota dalam menanggapi hal tersebut, karena kurangnya pengetahuan tentang sistem kemitraan kebun kelapa sawit dan mekanisme pembagian hasilnya.

Perbedaan pola kemitraan berpengaruh pada mekanisme pendapatan masyarakat petani. Pada pola kemitraan KKPA mekanisme pendapatan petani yaitu penerimaan KUD dari perusahaan dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh koperasi tersebut dalam pengelolaan kebun yang telah di sepakati pada sistem kemitraan. Pendapatan petani PIR-Trans adalah penerimaan dari KUD dikurangi dengan biaya-biaya produksi yang dikorbankan/diperhitungkan di tingkat petani plasma, atau dengan kata lain pendapatan bersih petani adalah penerimaan dari tingkat KUD yang di terima oleh kelompok tani dikurangi biaya-biaya oprasional yang dikeluarkan kelompok tani, misalnya biaya angkut dari kebun menuju PKS dan biaya lain telah disepakati dengan petani.

B. Perumusan Masalah

Mekanisme pendapatan petani anggota kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dan petani pola PIR-Trans dikecamatan singkup ini dinaungi oleh perusahaan PT.Harapan Sawit Lestari dan PT. Bukit Palem. Yang mana pola kemitraan KKPA adalah pola yang diberikan oleh PT.Harapan Sawit Lestari dan pola PIR-TRANS diberikan oleh PT.Bukit Palem. Kedua perusahaan ini bermitra dengan masyarakat dikecamatan Singkup dengan wadah koperasi.

Para petani dalam sistem kemitraan pola KKPA dan pola PIR-Trans memiliki perbedaan harapan penerimaan petani dengan yang diberikan oleh perusahaan ini terhadap petani plasma perbulan. Sedangkan tujuan pembentukan perkebunan dan system kemitraannya yaitu mensjahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan skala usaha petani baik maupun perusahaan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendapatan dan pembiayaan pada pola kemitraan KKPA dan PIR-Trans.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendapatan dan pembiayaan petani anggota KKPA dan petani PIR-Trans

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan maupun koperasi untuk mengambil keputusan untuk menyempurnakan pelaksanaan kemitraan yang telah berlangsung sehingga ada hubungan kemitraan yang semakin kuat dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
2. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang kemitraan dan mekanisme penentuan pendapatan petani kemitraan KKPA dan petani PIR-TRANS secara langsung.